SIAP DIBAWA KE PARIPURNA

Revisi RUU ITE Segera Dijadikan UU

JAKARTA (KR) - Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk dibawa ke Rapat Paripurna selanjutnya dan disiapkan untuk jadi regulasi.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengesahkan persetujuan Naskah RUU ITE di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (22/11), dalam rapat kerja bersama Pemerintah yang dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

RUU ITE tersebut merupakan revisi kedua yang dilakukan Pemerintah dan DPR RI dan kini naskah RUU ITE telah disetujui agar dapat segera dijadikan Undang Undang.

Pembahasan RUU ITE kali ini telah berlangsung sejak April 2023 sebanyak 14 kali untuk membahas Daftar Internalisasi Masalah (DIM) yang terdiri tujuh DIM berupa usulan bersifat tetap, tujuh DIM usulan perubahan redaksional, dan 24 DIM usulan perubahan substansi. Ada juga 16 DIM berupa usulan baru dari fraksi serta 26 DIM berupa DIM penjelasan.

Secara keseluruhan, Tim Panitia Kerja (Panja) untuk RUU ITE telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati perubahan pada 14 pasal eksisting dan penambahan 5 pasal RUU Perubahan Kedua UU ITE.

Seluruh pembahasan maupun perubahan yang dibawa dalam naskah RUU ITE tersebut disetujui oleh sembilan fraksi di dalam Komisi I DPR RI yang terdiri Fraksi Partai PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PKS, PKB, PAN, dan PPP.

Sebagai perwakilan Pemerintah, Menkominfo mengapresiasi kerja sama selama delapan bulan terakhir antara Pemerintah dan Komisi I DPR RI yang dengan cepat merampungkan RUU ITE.

"Atas segala perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga RUU Perubahan Kedua UU ITE dapat berguna bagi kemajuan bangsa, menjadi dharma bakti untuk nusa dan bangsa, serta menjadi ladang ibadah bagi kita semua," ujar Budi.

Untuk mengesahkan persetujuan tersebut, rapat kerja ditutup dengan penandatanganan dari perwakilan masing-masing partai di Komisi I DPR RI dan juga Menkominfo. **(Ant/San)-f**

Agus

Sambungan hal 1

"Bahkan, sampai sekarang ada prajurit TNI di bidang kesehatan dibawa ke hutan untuk *nyuntik* (vaksinasi), kemudian juga stunting kita ikut di situ," katanya.

Panglima mengatakan, TNI juga mengedepankan politik diplomatik militer antarwilayah yang ada di perairan Irian untuk mempererat hubungan baik dengan negara tetangga di wilayah Papua.

"Kita akan perketat semacam *memorandum of understanding* (MoU) agar ada hubungan diplomatik, mungkin latihan bersama, pertukaran pelajar. Itu mempererat hubungan baik dengan negara tetangga di wilayah Papua," tegasnya.

Sementara taktik hard power juga digunakan di Tanah Papua dalam upaya menghadapi kelompok kriminal bersenjata. "Mereka kombatan itu bersenjata, jadi harus lawannya *ya* senjata. Tapi, kita kedepankan *soft power*," jelas Panglima TNI.

Agus menambahkan, pendekatan soft power tersebut dilakukan secara bersama-sama, bersinergi antara TNI dengan semua kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan terkait. **(Ant)-f**

Muhammadiyah

Sambungan hal 1

Mengenai dukungan Muhammadiyah kepada pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2024, Haedar menegaskan, Muhammadiyah sudah dikenal sebagai organisasi nonpolitik praktis.

"Ormas-ormas yang lain tidak dalam kapasitas untuk mendukung, yang dukung-mendukung itu parpol. Kami justru lewat cara dialogis, cara yang bersifat keilmuan dan lewat cara elegan membuka ruang masyarakat untuk tahu dan cerdas dengan yang mereka pilih, bertanggung jawab apa yang mereka pilih," ujarnya.

Haedar menilai pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar merupakan aset strategis bangsa. "Kami berharap Rahmatullah melimpahi Mas Anies dan Gus Imin sebagai aset strategis bangsa," katanya.

Pada kesempatan sama, Anies Baswedan mengapresiasi Muhammadiyah atas acara dialog tersebut. "Ini kesempatan bagi kami untuk menjelaskan apa yang menjadi rekam jejak, apa yang menjadi karya, apa yang jadi visi misi dan rencana. Di sisi lain bagi masyarakat melakukan penilaian, pencermatan atas apa yang kami lakukan," katanya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat membuat proses pemilu Indonesia menjadi proses pemilu yang penuh informasi. Hal senada diucapkan Muhaimin Iskandar yang mengatakan, Muhammadiyah bukan sekadar mendidik anak bangsa, tetapi juga mendidik untuk cerdas berpolitik. **(Ant/Obi)-d**

Bahasa

Sambungan hal 1

Kita patut merayakan penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO sebagai perwujudan amanat Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-undang 24/2009 sebenarnya juga menggemakan amanat dan semangat luhur perwakilan pemuda-pemudi Indonesia dalam Sumpah Pemuda 1928. Mereka bersepakat untuk menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Menilik sejarahnya, Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan karena sifatnya yang egaliter dan populer. Dua sifat ini diterima di kalangan muda yang merindukan kesatuan bangsa pada era Sumpah Pemuda dan setelahnya. Pilihan ini berbuah manis karena nyatanya bahasa Indonesia mampu menyatukan bahkan juga bangsa kita dengan bangsa-bangsa lain.

Saat ini Bahasa Indonesia dituturkan sekitar 275 juta penutur asli Indonesia dan 25 juta penutur asing. Hingga medio 2022, sekitar dua juta orang Amerika dan Eropa. Kemudian 2,4 juta orang Asia-Pasifik dan Afrika, dan 5,2 juta orang Asia Tenggara (tidak termasuk Indonesia) bertutur Bahasa Indonesia (Solikhan, 2022).

Saat ini ada 28 institusi global di 56 negara dengan sekitar 142 ribu warga negara asing yang sedang belajar Bahasa Indonesia di bawah program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA). Bahasa Indonesia juga berkerabat dengan bahasa Melayu yang dituturkan di Asia Tenggara. Bahkan Australia sempat giat mendatangkan para pengajar Bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia termasuk bahasa yang mudah dipelajari orang dari berbagai negara. Karena bahasa persatuan kita tidak memiliki aturan tata bahasa yang rumit seperti bahasa rumpun Roman ataupun bahasa rumpun Anglo-Saxon. Alfabet Latin yang digunakan Bahasa Indonesia juga memudahkan penutur asing.

Hanya saja, saking lentur dan mudahnya, Bahasa Indonesia kerap menyulitkan. Kesulitan ini kita alami, dalam peliknya memahami ragam bahasa percakapan yang sangat dinamis. Kehadiran media sosial menjadi panggung bagi penciptaan ungkapan dan kata baru yang asing bagi khalayak.

Dinamisnya Bahasa Indonesia ini juga kerap menyulitkan penutur asing. Sebagian besar terkejut ketika datang ke Indonesia. Karena Bahasa Indonesia ëbakuí yang mereka pelajari ternyata tidak dituturkan dalam pergaulan. Bukan lantas berarti bahwa ragam baku atau cakapan yang lebih benar. Bahasa adalah wahana komunikasi yang situasional dan dinamis.

Di sisi lain, Bahasa Indonesia menawarkan peluang sebagai bahasa pergaulan internasional yang sangat inklusif dan adaptif. Bahasa Indonesia sangat terbuka memungut dan mengadaptasi kata-kata bahasa asing dan daerah. Memang benar, bahasa Indonesia masih miskin kosakata. Akan tetapi, justru bahasa Indonesia menawarkan peluang masuknya kosakata baru dari aneka sumber.

Kita sebagai penutur Bahasa Indonesia perlu berbangga diri setelah penetapan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi UNESCO. Akan tetapi, kebanggaan itu perlu kita wujudkan dengan kecintaan berbahasa Indonesia di ruang privat, publik, dan media sosial.

Kita bisa mulai dengan memopulerkan nama-nama anak dan jenama dari kosakata Bahasa Indonesia. Bukankah kamus bahasa Indonesia memuat *paramarta, kirana, syahda* dan *tala*? Mari kita tunjukkan cinta kita dengan bangga berbahasa Indonesia!

(*Penulis adalah Dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma)-f*

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

DUKUNGAN ALAT, INSENTIF KADER DAN ASUPAN GIZI ANAK

Penguatan Posyandu Tingkatkan Derajat Kesehatan

YOGYA (KR) - Upaya untuk memperkuat operasional pos pelayanan terpadu (posyandu) di wilayah akhirnya membuahkan hasil. Kalangan dewan dan pemkot telah menyepakati berbagai dukungan untuk direalisasikan pada tahun depan. Penguatan itu diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam penuntasan kasus stunting.

Choliq Nugroho Adji
Fraksi Partai NasDem

KR-Istimewa

Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogya Choliq Nugroho Adji, menjelaskan upaya penguatan sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun ini. Terutama dengan pembagian peralatan berupa antropometri kit yang merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan. "Dukungan alat itu merupakan advokasi rekan-rekan di Komisi D bersama Dinas Kesehatan Kota Yogya. Semua posyandu yang ada di Kota Yogya sudah memiliki alat tersebut dan tidak perlu lagi harus meminjam ke puskesmas yang jumlahnya terbatas," urainya.

Selain itu disepakati pula adanya insentif bagi kader posyandu. Teknisnya berupa fasilitasi kegiatan yang di dalamnya honor transport sesuai standar harga barang dan jasa pemerintah. Insentif bagi kader posyandu itu diharapkan mampu memacu semangat dalam mengintensifkan kegiatan posyandu di wilayah.

Adji menambahkan, penguatan juga dilakukan dari aspek asupan gizi anak yakni dengan menambah alokasi makanan tambahan bagi peserta posyandu. Sebelumnya makanan tambahan hanya diberikan bagi anak yang terindikasi mengalami stunting, sedangkan tahun depan semua anak yang datang ke posyandu akan memperoleh makanan tambahan. "Harapannya ini juga bisa mendorong seluruh anak di wilayah agar rutin datang ke posyandu supaya masa pertumbuhannya dapat dipantau secara berkelanjutan. Sehingga ketika ada indikasi stunting, sedini mungkin bisa langsung diantisipasi," jelasnya.

Oleh karena itu Adji juga berharap keberadaan posyandu mampu menjadi agen percepatan penuntasan kasus stunting di Kota Yogya. Tidak hanya menangani kasus yang sudah ada melainkan hingga upaya preventif agar tidak muncul kasus baru. Aktivitas posyandu bahkan tidak sekadar mampu berkontribusi dalam penanganan stunting melainkan masalah kesehatan lainnya, terutama yang dialami oleh ibu dan anak. Dengan begitu, derajat kesehatan masyarakat akan semakin meningkat. **(Dhi)-f**

Kemenag

Sambungan hal 1

Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis mengatakan telah membahas biaya haji dengan BPKH dan stakeholder terkait. John mengatakan DPR juga telah menyisir seluruh komponen agar biaya haji 2024 dapat terjangkau.

"Kami sudah melakukan beberapa pertemuan, kita menyisir seluruh komponen-komponen, sehingga biaya ibadah perjalanan haji itu dapat terjangkau," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kemenag mengusulkan rata-rata BPIH sebesar Rp105 juta per orang untuk penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M.

"Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah Rp 105.095.032," ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, baru-baru ini.

BPIH merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. BPIH bisa diartikan sebagai biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji dan dikelola oleh pemerintah setiap musim haji.

Namun, usulan tersebut mengundang keberatan banyak pihak, terutama para calon jemaah haji. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR masih terus membahas dan mengkaji usulan biaya haji tersebut. Para wakil rakyat ini tetap menginginkan adanya penurunan atau setidak-tidaknya sama dengan BPIH tahun lalu.

Menurut Menag penyusunan BPIH menggunakan asumsi nilai tukar kurs dollar terhadap rupiah sebesar Rp 16 ribu. Sedangkan asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp 4.266.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan, usulan besaran BPIH tersebut akan menjadi bahan awal untuk pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat Panitia Kerja (Panja) Haji. **(Ati)-f**

3 WNI

Sambungan hal 1

Pemerintah Indonesia telah mengecam keras serangan Israel di RS itu karena merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional. Indonesia juga mendesak semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, untuk menggunakan pengaruh dan kemampuannya guna mendesak Israel menghentikan kekejamannya.

Pekan lalu, Israel juga menyerang RS Al Shifa dan menuding Hamas memiliki pusat komando bawah tanah di bawah fasilitas medis itu. Tudingan itu dibantah oleh kelompok perlawanan Palestina tersebut.

Lebih dari 13.000 orang di Gaza tewas akibat gelombang pengeboman Israel sejak 7 Oktober 2023. Sementara itu, jumlah korban tewas di pihak Israel mencapai 1.200 jiwa. **(Ant/San)-d**

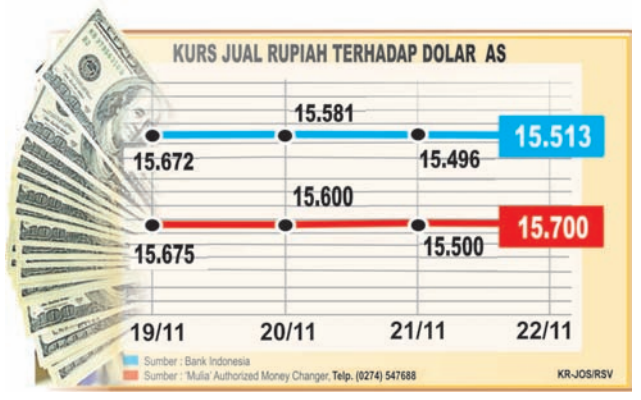

Kedua

Sambungan hal 1

Hakim Ketua Cahyono, sempat memberikan kesempatan pada dua terdakwa untuk melayangkan eksepsi setelah mendengar dakwaan jaksa. Namun terdakwa menyatakan seluruh hal yang disampaikan jaksa sudah benar dan tak mengajukan eksepsi. **(Fxh)-f**

Prakiraan Cuaca — Kamis, 23 November 2023

Lokasi	Cuaca Pagi	Cuaca Siang	Cuaca Malam	Cuaca Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko

Proses Kebijakan Publik: Dimana Peran Mahasiswa?

Ferri Wicaksono, S.IP., MA.
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas AMIKOM Yogyakarta

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

MAHASISWA, salah satu entitas akademik dengan segenap idealitas dan manuvernya. Tentu mahasiswa tidaklah sama dengan siswa di jenjang pendidikan sekolah menengah. Mimbar akademik sebagai suatu ruang aktualisasi yang menjadi "keistimewaan" bagi mereka yang menyandang status mahasiswa, meskipun itu belum tertulis tegas di peraturan perundang-undangan. Jika berbicara konteks kebijakan publik, ketika kita sebut kata mahasiswa, maka dalam benak kita selalu mengarah pada aktivitas demo atau demonstrasi. Tidaklah salah, namun apakah peran mahasiswa dalam konteks kebijakan publik sebatas itu?

Kita awali pembahasan dari pertanyaan: bagaimana sebetulnya proses kebijakan publik? Proses kebijakan merupakan sebuah siklus, maka kebijakan publik akan terus berproses dan dapat dikatakan tiada hentinya. Mengapa demikian? Proses kebijakan publik setidaknya mencakup 4 (empat) tahapan utama, terdiri atas: agenda setting – formulasi kebijakan – implementasi kebijakan – monitoring dan evaluasi kebijakan, dan akan kembali lagi pada tahap agenda setting. Inti dari sebuah proses kebijakan publik diawali dari ketepatan didalam menentukan masalah publik, bukan masalah privat (individual) tentunya, selanjutnya disepakati menjadi masalah kebijakan yang akan diselesaikan dengan mekanisme negara. Nah perlu kita pahami bersama bahwa penyelesaikan masalah publik tidak akan pernah sempurna, pasti ada pihak yang terpuaskan namun juga ada pihak yang terciderai, maka dari itu kebijakan publik akan terus berproses.

Di dalam proses kebijakan publik tersebut tentu kita mengenal istilah aktor kebijakan publik. Maka pembahasan kita selanjutnya: siapa saja aktor kebijakan publik? apakah mahasiswa termasuk bagian dari aktor tersebut? Berbicara aktor kebijakan publik, penulis disini mencoba mengidentifikasi 5 (lima) aktor utama kebijakan publik: 1). Pemerintah/Pejabat Negara: Mereka yang mempunyai jabatan dan wewenang menurut peraturan perundang-undangan, mereka sering diistilahkan sebagai pemangku kebijakan. Ada definisi kebijakan publik yang cukup populer, sebagaimana disampaikan Thomas Dye bahwa 'public policy is whatever government choose to do or not to do'. Dari definisi tersebut tampak jelas bahwa pilihan atas sebuah kebijakan publik yang akan diagendakan hanya ada pada pemerintah, pertimbangan utama mereka utamanya ada 2 (dua) yakni: implikasi sangat luas jika kebijakan tersebut diberlakukan (public oriented) dan negara mempunyai sumber daya (man, money, method, etc) untuk menjalankan kebijakan tersebut;

2). Swasta: Biasanya pihak swasta atau suatu perusahaan disini memiliki peran corporate social responsibility (CSR), meskipun business oriented ataupun private oriented tidak bisa dihindarkan, namun mereka berperan utama mulai dari alternatif sumber daya hingga partner pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik;

3). Civil Society: Mereka secara umum lebih dikenal sebagai objek utama kebijakan, meskipun dalam perkembangannya saat ini gencar diperkenalkan konsep keswadayaan masyarakat untuk lebih menempatkan posisi masyarakat sebagai bagian dari subjek pelaksana kebijakan publik. Namun tetap bahwa individual oriented masih melekat pada karakteristik mereka, intinya mereka mau berkorban ketika ada 'keuntungan' yang didapat mereka;

4). Non-Government Organization (NGO); Mereka bisa diistilahkan sebagai pejuang publik. Orientasi utama mereka adalah keberpihakan (partiality oriented). Sikap mereka terhadap pemerintah selalu kritis, bisa dikatakan mereka akan terus mencari celah kesalahan pemerintah. Secara positif, lantas bukan bertujuan menghambat proses kebijakan publik, namun lebih pada memastikan kebijakan publik harus 'menguntungkan publik';

5). Akademisi; Biasanya lebih melekat pada entitas perguruan tinggi, mahasiswa termasuk di dalamnya. Idealnya, mereka mengedepankan scientist oriented. Cara pandang mereka berdasar atas logika riset, bukan kepentingan individu, bukan sebatas keberpihakan publik semata. Dari hasil riset ilmiah yang mereka lakukan, bisa semakin memperkuat urgensi sebuah kebijakan publik, namun bisa juga semakin memperlemah urgensi sebuah kebijakan publik.

Secara lugas penulis sampaikan bahwa peran utama mahasiswa sebagai bagian dari entitas akademisi didalam proses kebijakan publik adalah menyampaikan hasil kajian ilmiah untuk mempertegas urgensi kebijakan publik. Teruntuk bagi para mahasiswa, semoga kalian senantiasa menjadi insan yang kritis dan logis, maka kalian hebat!!!